BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama bertahun-tahun, ‘miskin’ didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Banyak negara terus mengukur kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap pelayanan, bahkan hingga sekarang salah satu definisi kemiskinan yang paling dikenal adalah garis kemiskinan dengan pendapatan minimum US$1 per hari. Bank Dunia masih menggunakan standar ini untuk membandingkan kemiskinan secara global (Gonner dkk, 2007). Di Indonesia sendiri melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 12,15 persen atau 29,13 juta jiwa. Sementara ditahun 2013 berada pada angka 11,23 persen. Prosentase ini setara dengan 27,48 juta penduduk. Jika menganut makna kemiskinan versi Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 97,9 juta jiwa, atau setara dengan 40 persen penduduk (Faqih, 2012).

Di Kota Solo sendiri, berdasarkan pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setempat, jumlah penduduk miskin mencapai 133.000 jiwa atau sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk Solo yang mencapai 530.000 jiwa. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS’08) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya tercatat sebanyak 85.000 jiwa, ataupun data dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hanya mencatat sebanyak 125.000-an warga miskin di Kota Solo (Suharsih, 2012). Adanya perbedaan data mengenai kemiskinan antara satu instansi dengan instansi yang lain memang diakui oleh petugas yang bekerja di instansi terkait, salah satunya Badan Pusat Statistik (BPS). Petugas yang bekerja di BPS mengakui adanya masalah metodologi dan logistik yang sangat besar sehingga data yang diperoleh sangat berpotensi bias. Oleh sebab itu, kemungkinan besar semua data kemiskinan resmi yang ada tidak dapat diandalkan sepenuhnya (Gonner dkk, 2007).

Potensi bias mengenai kemiskinan pada masyarakat kita terjadi salah satunya karena ‘miskin’ sering didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Uang memang merupakan hal penting dalam kehidupan. Dengan uang, orang dapat membeli makanan, obat-obatan dan pendidikan. Tetapi uang saja tidak cukup. Banyak keluarga yang memiliki cukup pendapatan, tetapi kekurangan akses terhadap pelayanan kesehatan, air minum bersih atau pendidikan formal. Pada kasus lain, sebuah keluarga mungkin memiliki pendapatan tunai yang kecil, tetapi dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan kecil tidak serta merta dapat diartikan sebagai keluarga miskin (Gonner dkk, 2007).

Masyarakat dengan pendapatan atau penghasilan yang rendah memang tidak serta merta dapat diartikan sebagai masyarakat miskin, namun bukan berarti penghasilan tidak digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Seperti halnya kriteria masyarakat miskin menurut pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diantaranya adalah penghasilan

rendah atau berada dibawah garis kemiskinan seperti tercermin dari tingkat pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan pada umumnya rendah: tidak tamat SLTP, tidak ada ketrampilan tambahan, derajat kesehatan dan gizi rendah, tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni: termasuk tidak memiliki MCK, pemilikan harta sangat terbatas jumlah atau nilainya, hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, serta akses informasi terbatas (baca koran, radio) (Widianto, 2011).

Seperti halnya pemerintah melaui TNP2K yang mengkategorikan masyarakat miskin tidak hanya berdasarkan pendapatan, penelitian yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) selama dua dekade terakhir juga memaparkan perubahan konsep kemiskinan, dari pertimbangan pendapatan atau konsumsi yang sederhana menjadi definisi yang mencakup multidimensi kekurangan dan kesejahteraan. Saat ini, selain indeks US$1 di atas, organisasi-organisasi pembangunan terkemuka seperti Bank Dunia dan UNDP (*United Nations Development Programme*) menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subjektif. Konsep baru mengenai definisi kemiskinan yang telah dikemukakan, menempatkan kesejahteraan subjektif pada dimensi paling akhir. Hal ini dikarenakan kesejahteraan subjektif dihasilkan dari sebuah evaluasi dan penilaian subjektif terhadap dimensi-dimensi lain didalam definisi kemiskinan (Gonner dkk, 2007).

Diener, Oishi dan Lucas (2003) mengenalkan teori evaluasi, dimana kesejahteraan subjektif ditentukan oleh bagaimana cara individu mengevaluasi informasi atau kejadian yang dialami. Hal ini melibatkan proses kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi tersebut akan diatur. Cara-cara yang digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa, juga dipengaruhi oleh temperamen, standar yang ditetapkan oleh individu, suasana hati, situasi yang terjadi dan dialami saat itu serta pengaruh budaya. Dengan kata lain kesejahteraan subjektif mencakup evaluasi kognitif dan afektif. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti kepuasan kerja, minat, dan hubungan. Reaksi afektif dalam kesejahteraan subjektif yang dimaksud adalah reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan.

Menurut Coon dan Mitterer (2006) kesejahteraan subjektif adalah kepuasan kehidupan secara umum yang dikombinasikan dengan banyaknya emosi positif yang dialami dan emosi negatif relatif sedikit dialami. Lebih jauh Diener, Lucas dan Oishi (2009) mengembangkan pengertian kesejahteraan subjektif sebagai konsep yang luas, meliputi pengalaman emosi menyenangkan, rendahnya tingkat *mood* negatif, dan kepuasan hidup yang tinggi. Sedangkan menurut Muba (2009) seseorang yang memiliki penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup akan cenderung bersikap lebih bahagia dan lebih puas.

Kesejahteraan subjektif bersifat sangat individual dan emosional. Kesejahteraan ini tidak memiliki nilai konstan, tetapi berubah-ubah sesuai dengan suasana hati dan lingkungan. Orang membandingkan standar kehidupan mereka dengan standar kehidupan orang lain atau dengan kesejahteraan mereka sebelumnya. Perasaan pribadi seperti kebahagiaan, keamanan, keterlibatan dan kepuasan, ikut menyumbang kesejahteraan subyektif secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kesejahteraan lain juga tercakup, seperti kesejahteraan jasmani, kesejahteraan sosial, kepemilikan martabat diri dan perasaan aman dan terjamin (Gonner dkk, 2007).

Diener, Oishi dan Lucas (2003) dalam teorinya sudah menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif dihasilkan dari sebuah evaluasi dan penilaian mengenai kehidupan secara keseluruhan, maka penelitian yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) mengenai kemiskinan melengkapi hal tersebut dengan atribut paling dasar atau inti yang akan menjadi materi evaluasi atau penilaian, yaitu mencakup ‘kebutuhan dasar’ seperti makanan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Selain itu, kapabilitas individu secara umum, yakni kecakapan dan kondisi fisik juga menjadi atribut inti yang berperan sebagai jembatan dalam mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dan kapabilitas individu digabung menjadi tiga kategori: kesehatan, materi dan pengetahuan, baik formal, informal atau tradisional. Bagi kebanyakan masyarakat lokal dalam kegiatan di Indonesia, ketiga inti ini juga disebut sebagai aspek pokok kemiskinan yang akan mempengaruhi keberadaan kesejahteraan subjektif. Selain atribut inti, CIFOR juga menjelaskan bagian eksternal yaitu faktor lingkungan

dalam memberikan sumbangan besar bagi keberadaan atribut inti. Faktor lingkungan terdiri dari lima konteks, yaitu lingkungan alam, ekonomi, sosial, politik dan prasarana serta pelayanan (Gonner, 2007).

Lingkungan alam mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan ekonomi mencakup kesempatan ekonomi dan jaring pengaman. Aspek-aspek seperti kapital dan kohesi sosial, rasa saling percaya dan konflik, tercakup dalam lingkungan sosial. Lingkungan politik terdiri dari hak dan partisipasi atau representasi dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan dan kebebasan. Lingkungan yang terakhir atau yang kelima adalah konteks lingkungan yang mempengaruhi keempat lingkungan konteks yang lain: prasarana dan pelayanan. Keduanya sebagian besar disediakan oleh badan-badan pemerintah, LSM, proyek pembangunan dan sektor swasta. Konteks yang terdiri dari lima lingkungan merupakan pendukung yang mendukung upaya-upaya inisiatif sendiri untuk keluar dari himpitan kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi, dimana salah satunya karena keterbatasan kapabilitas yang dimiliki individu (Gonner dkk, 2007).

Kombinasi aspek-aspek inti diatas terkait dengan terciptanya kesejahteraan subjektif, oleh karena itu peningkatan aspek-aspek inti umumnya juga meningkatkan kesejahteraan subjektif. Dengan bahasa yang sama penurunan kesejahteraan inti (aspek-aspek inti) biasanya juga mempengaruhi turunnya kesejahteraan subyektif. Pada skala waktu yang lebih panjang, baik aspek-aspek inti maupun kesejahteraan subyektif dipengaruhi oleh konteks (lingkungan). Misalnya, pengetahuan meningkat sebagai akibat dari membaiknya pendidikan,

masalah kesehatan meningkat karena polusi lingkungan, kesejahteraan subjektif turun karena adanya konflik sosial. Oleh karena itu, terdapat jalinan sebab akibat yang kuat antara konteks, aspek inti dan kesejahteraan subjektif (Gonner dkk, 2007).

Kesejahteraan subjektif yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah keberadaannya pada masyarakat miskin. Di Surakarta (Solo) terdapat kampung yang tergolong kumuh dan sebagian besar warganya adalah masyarakat miskin, daerah tersebut berada dibantaran sungai Bengawan Solo Jebres. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 70% warga yang tinggal di kampung tersebut adalah masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh. Selain pendapatan yang kecil, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut seringkali terkena luapan air sungai Bengawan Solo apabila terjadi hujan deras dengan volume air yang tinggi dan durasi waktu yang cukup lama (semalaman).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil interview awal kepada beberapa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, diketahui bahwa pemerintah kota cukup memperhatikan dan membantu keadaan mereka. Selain jaminan kesehatan, masyarakat bantaran sungai juga sering mendapatkan kunjungan dari petugas pemerintah untuk memantau keadaan pasca air sungai meluap, dan membantu beberapa kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai pasca terkena luapan air sungai Bengawan Solo. Setelah diketahui beberapa informasi melalui observasi dan wawancara awal, selanjutnya peneliti menggali informasi lebih dalam melalui wawancara terhadap salah satu masyarakat miskin

yang tinggal dibantaran sungai menggunakan daftar pertanyaan yang diadaptasi dari skala PANAS dan SWLS, dengan 22 pertanyaan yang mewakili kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui, bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai ternyata mampu menjalankan interaksi sosial mereka dengan cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan ketertarikan mereka terhadap kegiatan-kegiatan sosial dikampungnya, serta memberikan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Mereka juga merupakan masyarakat yang aktif, memiliki semangat, dan tekad, dimana hal tersebut menjadikan mereka pribadi yang kuat dan memiliki inspirasi untuk tetap berjuang dalam kehidupan yang serba sulit. Selain itu, diketahui bahwa sekalipun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan, bahkan tidak jarang berkekurangan, mereka tidak merasa malu dengan keadaan mereka, mereka juga tidak merasa tertekan, ataupun takut/gugup, ataupun khawatir. Walaupun mereka hidup miskin, tidak kemudian menjadikan mereka menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Menjalani hidup apa adanya dan tidak banyak menuntut, serta selalu bersyukur menjadikan mereka cukup puas dengan kehidupan yang mereka jalani sekarang.

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta bahwa masyarakat yang hidup miskin tidak selalu tidak bahagia dalam hidupnya. Bahkan dengan segala keterbatasan yang mereka punya, mereka mengaku cukup puas dengan kehidupan yang mereka jalani sekarang. Seperti terlihat dari kutipan wawancara terhadap subjek yang mengatakan “ya hidup serba pas-pasan begini ya harus tetap disyukuri mas, dijalani ikhlas apa adanya, *dadi awake dewe ki sing*

nglakoni yo penak, sing nglakoni seneng". Mereka memiliki ukuran dan cara yang telah mereka tentukan sendiri untuk tetap merasa bahagia dan puas dalam hidupnya. Meskipun masyarakat miskin juga bisa merasakan bahagia dan puas dalam hidup mereka, namun kita tahu bahwa masyarakat miskin sering menghadapi masalah atau kesulitan yang mungkin tidak ditemui oleh masyarakat yang memiliki banyak uang, misalnya dalam segi ekonomi (contoh: papan dan pangan) ataupun akses terhadap gaya hidup masa kini, seperti teknologi dan informasi.

Melihat keadaan dan situasi yang terjadi pada masyarakat miskin di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres, permasalahan dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana usaha atau cara individu yang tergolong masyarakat miskin tersebut mempertahankan kesejahteraan subjektif dalam dirinya apabila aspek-aspek inti tidak terpenuhi, sedangkan didalam standar penelitian yang telah dilakukan Gonner dkk (2007) menyatakan bahwa aspek inti dan konteks lingkunganlah yang berperan dalam menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan subjektif pada individu sebelum terjadinya proses evaluasi secara subjektif.

Selain aspek inti dan konteks lingkungan, proses evaluasi yang harus dilewati untuk menghasilkan kesejahteraan subjektif, menurut Campton (2005) dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah harga diri (*self-esteem*), *sense of percieved control*, kepribadian, optimisme, hubungan sosial dan dukungan sosial, neurotisme yang rendah, pengaruh masyarakat atau budaya, proses kognitif, serta pemahaman tentang makna dan tujuan hidup. Berdasarkan kajian

yang pernah dilakukan, pemahaman tentang makna dan tujuan hidup sering dikaitkan dengan konsep religiusitas (Ancok, 1994). Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Krause (2003) yang menyatakan bahwa religiusitas merupakan perwujudan nyata ilmu agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hal tersebut diupayakan untuk menemukan tujuan dan makna dalam hidup mereka. Penelitian tersebut menyatakan bahwa fungsi dasar dari agama yang terwujud kedalam dimensi religiusitas adalah untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan mendasar yaitu menemukan makna dan tujuan hidup (Krause, 2003).

Selain religiusitas, pemahaman makna dan tujuan hidup juga sering dikaitkan dengan spiritualitas. Berbeda dengan konsep religiusitas, spiritualitas merujuk pada batin seseorang, yaitu kemampuan manusia atau individu untuk memahami dan mengatur setiap kejadian atau pengalaman yang terjadi dan termanifestasi pada hal-hal yang terjadi dalam batin seseorang seperti kagaguman, kasih sayang, ketenangan, kesunyian, dan kepastian (Atchley, 2008). Perbedaan antara spiritualitas dan religiusitas dapat dilihat pada aktivitasnya, spiritualitas hanya merujuk pada hal-hal yang terjadi pada batin seseorang seperti proses berpikir dan persepsi, sedangkan religiusitas merujuk pada hal-hal yang lebih kompleks yang didasari nilai-nilai agama, seperti keyakinan, ritual/peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan perilaku sosial (Jalaludin, 2004).

Selain pemahaman tentang makna dan tujuan hidup, masih ada beberapa faktor-faktor dari kesejahteraan subjektif yang berkaitan atau dipengaruhi oleh religiusitas, diantaranya adalah harga diri dan optimisme. Krause (2003) dalam

penelitiannya menyatakan alasan mengapa religiusitas dikaitkan dengan harga diri, yaitu adanya keyakinan pada diri seseorang bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk hidup mereka akan membangun sebuah perasaan bahwa Tuhan mengasihi dan memperhatikan mereka, perasaan dicintai, dipedulikan, dan berharga. Pandangan diri yang dipegang tersebut akan memperkuat harga diri dalam hidup mereka. Selanjutnya Krause (2003) juga menjelaskan mengenai sumbangan religiusitas terhadap optimisme tentang masa depan. Penelitian menyatakan bahwa religiusitas meningkatkan perasaan optimisme dengan membantu seseorang melihat bahwa hidup mereka akan mengikuti rencana spesifik dan bermanfaat yang telah dirancang oleh Tuhan.

Senada dengan penelitian Krause (2003), hasil penelitian Darmayanti (2012) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan subjektif, melalui kepribadian tangguh, harga diri dan optimisme. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa religiusitas yang tinggi akan meningkatkan optimisme, harga diri, dan kepribadian tangguh, dimana ketiga hal tersebut secara signifikan meningkatkan kesejahteraan subjektif. Studi lain (Lin dan Putnam, 2010) juga menunjukkan religiusitas yang diukur melalui pengalaman rohani dan religius, praktik keagamaan, praktik sosial, rasa kedakatan dengan Tuhan, dan keyakinan teologis secara signifikan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan subjektif, menyumbang angka 28,2 persen pada kepuasan hidup, lalu diikuti dengan kebahagiaan sebagai efek positif jangka pendek.

Penelitian melaporkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan religi atau religiusitas yang besar, memiliki kesejahteraan psikologis yang besar (Ariati, 2010). Sejumlah penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa orang-orang dengan keimanan terhadap agama yang lebih kuat, lebih memandang penting agama dalam hidupnya, dan sering mengikuti kegiatan keagamaan diketahui memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi (McGregor dan Little dalam Campton, 2005).

Hawari (2002) mengemukakan bahwa religiusitas dalam bentuk pengalaman agama dapat meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang. Mochon, Norton, dan Ariely (2010) dalam penelitiannya juga menunjukkan hal yang sama, bahwa orang-orang dengan keyakinan religius yang lemah cenderung merasa kurang bahagia, sedangkan orang-orang yang sangat religius cenderung memiliki tingkat kesejahteraan subjektif lebih tinggi. Lebih spesifik Suhail dan Chaudhry (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas merupakan prediktor yang kuat untuk kesejahteraan subjektif, meskipun religiusitas bukan merupakan prediktor terbaik jika dibandingkan dengan dukungan sosial dan kepuasan kerja, namun lebih unggul dibandingkan faktor usia, harga diri, dan tipe kepribadian. Hasil dari penelitian-penelitian diataslah yang menjadi alasan dan pertimbangan peneliti memilih religiusitas untuk diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif.

Sejak manusia lahir di dunia, sekalipun dalam keluarga yang berkekurangan atau bisa dikatakan miskin, manusia mempunyai potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan dengan kata lain percaya adanya kekuatan di

luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Hal ini yang kemudian disebut dengan religiusitas (Yulianto, 2006). Apabila dikaitkan dengan kondisi dimana individu yang tergolong masyarakat miskin merasa dalam keadaan yang tidak berdaya, karena kapabilitas sebagai seorang manusia sudah tidak lagi menolong, dan ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak mendukung, maka religiusitas inilah yang kemudian menjadi jembatan untuk membawa seseorang memiliki harapan untuk hidupnya, atau paling tidak membawa seseorang hidup berserah dan memiliki kepasrahan diri kepada Tuhan. Kepasrahan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa ada kekuatan diluar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan inilah yang akan membantu individu meregulasi emosi-emosi negatif sehingga individu mampu bersyukur dalam situasi atau keadaan apapun yang sedang dihadapi.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Krause (2003) dalam penelitiannya bahwa religiusitas memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesulitan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan, serta membantu seseorang melihat alasan spiritual untuk situasi yang dirasa sulit dan membantu mereka menemukan harapan dalam setiap permasalahan. Ketika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi dan mampu melihat segala sesuatunya dengan positif maka hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut mengevaluasi hidupnya secara keseluruhan, dimana evaluasi tersebut merupakan proses yang harus dilewati seseorang untuk mencapai kesejahteraan subjektif dalam hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, “Apakah ada Hubungan antara

Religiusitas dengan Kesejahteraan Subjektif pada Masyarakat Miskin?". Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada warga miskin yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres dengan judul "Hubungan antara Religiusitas dengan Kesejahteraan Subjektif pada Masyarakat Miskin di Bantaran Sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta."

B. Tujuan Penelitian

1. Membuktikan secara empiris hubungan antara religiusitas dengan kesejahteraan subjektif pada masyarakat miskin yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta.
2. Mengetahui tingkat religiusitas masyarakat miskin yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta.
3. Mengetahui tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat miskin yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta.
4. Mengetahui sumbangan efektif religiusitas terhadap kesejahteraan subjektif pada masyarakat miskin yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pengembangan kualitas kehidupan masyarakat miskin yang dinilai banyak orang sulit untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan langkah awal dalam kajian Psikologi Sosial dalam upaya menciptakan kesejahteraan subjektif pada semua orang, khususnya dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin.